

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022**

Pada hari Rabu Tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ballroom Hotel Mahkota Kota Singkawang, telah diselenggarakan musrenbang RKPD Kota Singkawang yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran berita acara ini :

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan yang disampaikan oleh Wali Kota Singkawang
2. Sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat;
3. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
4. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
5. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh pemateri sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang RKPD, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 03 Maret 2021

Jam : 11.30 WIB

Tempat : Ballroom Hotel Mahkota Singkawang

Seluruh peserta Musrenbang RKPD Kota Singkawang

MENYEPAKATI

- KESATU** : Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kota Singkawang Tahun 2022;
- KEDUA** : Hasil Musrenbang Tingkat Kota merupakan bahan acuan bagi usulan program/kegiatan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Singkawang-Bengkayang maupun anggota DPRD Kota Singkawang;
- KETIGA** : Sepakat memperjuangkan masuknya usulan program/kegiatan hasil musrenbang Kota Singkawang Tahun 2022 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun yang berkenaan melalui dana APBD Provinsi dan APBN;

KEEMPAT : Rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2022 untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RKPD Kota Singkawang 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Singkawang, 03 Maret 2021

Wali Kota Singkawang

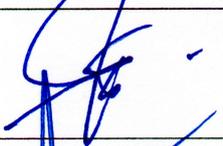
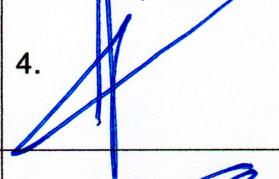
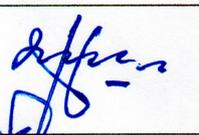
Selaku Pimpinan Sidang Musrenbang RKPD

Kota Singkawang



(TUHAI CHUI MIE, SE., M.H)

Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2022

NO	NAMA	UTUSAN	TANDA TANGAN
1	Ir. SUKALIMAN, MT	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1. 
2	SUJIANTO	DPRD KOTA SINGKAWANG	2. 
3	Ir. H. YUSNITA FITRIADI	BAPPEDA KOTA SINGKAWANG	3. 
4	dr. BARITA P. OMPUSUNGGU	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG	4. 
5	Drs. AHYADI, MM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG	5. 
6	JULI WAHYUNI, S.Sos.,M.Si	KETUA TP PKK KOTA SINGKAWANG	6. 
7	ABDUL MALIK	TOKOH MASYARAKAT	7. 



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1 Pasiran, Singkawang Barat – 79123

Telepon : (0562) 635727 Faks : (0562) 635727

Email: bappeda@singkawangkota.go.id

NOTULEN

- Acara : Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2022
- Hari / Tanggal : Rabu / 3 Maret 2021
- Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Ball Room Hotel Mahkota Singkawang
- Peserta Rapat : Kegiatan diikuti oleh ±170 peserta terdiri dari:
1. Gubernur Kalimantan Barat
 2. Walikota Singkawang
 3. Wakil Wali Kota Singkawang
 4. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
 5. Sekretaris DPRD Kota Singkawang
 6. Unsur FORKOPIMDA Kota Singkawang
 7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Urusan Pelayanan Dasar)
 8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
 9. Camat dan Lurah se-Kota Singkawang
 10. Pimpinan BUMN/BUMD Kota Singkawang
 11. Anggota DPRD Kota Singkawang
 12. Ketua organisasi/LSM di Kota Singkawang
 13. Tokoh masyarakat

Sambutan dan pembukaan oleh Wali Kota Singkawang:

1. Musrenbang merupakan penyelarasan program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan dengan tetap mengedepankan prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektivitas, efisiensi dan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah.
2. Kota Singkawang mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar ±Rp 200 milyar yang difokuskan untuk memulihkan perekonomian Kota Singkawang yang terdampak COVID-19 dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan pasar.
3. Pemerintah daerah dituntut memunculkan inovasi, ide dan kreativitas untuk bergotongroyong dalam membangun Kota Singkawang.
4. Perlu adanya kerjasama antara DPRD tingkat provinsi (Dapil Singkawang) dan DPRD tingkat kota untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Kota Singkawang di akhir periode kepemimpinan Wali Kota.

Arahan Gubernur Kalimantan Barat:

1. Jika tata kelola pemerintahan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik, maka seluruh perencanaan pembangunan akan berjalan dengan baik pula.
2. Terjadi defisit sebesar Rp 691 milyar pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur. Oleh karena itu terdapat beberapa program kerja yang dibatalkan pelaksanaannya. Selanjutnya pada tahun kedua difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan perkebunan.
3. Dari lima rumah sakit rujukan nasional, RSUD dr. Soedarso adalah salah satunya. Namun masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan ruang operasi. Oleh karena itu akan dilakukan penambahan ruangan operasi dan peyediaan peralatan penunjang.
4. Pembangunan tahun depan akan berfokus pada penyediaan infrastruktur jalan dan pengendalian banjir, termasuk salah satunya di Kota Singkawang. Juga berfokus pada peningkatan jalan provinsi yang ada di Kota Singkawang.
5. RPJP disusun berdasarkan data tahun sebelumnya. Namun data yang tersedia berbeda dengan fakta di lapangan. Misalnya data jalan provinsi dalam kondisi mantap dilaporkan sebesar 86%, namun faktanya di tahun pertama periode kepemimpinan Gubernur, kondisi jalan mantap sebesar 49%, meningkat di tahun kedua sebesar 65%, hingga di akhir periode nanti ditargetkan mencapai 80 s/d 90%.
6. Pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan data. Tanpa data yang baik, tidak akan mendapatkan hasil yang baik dalam perencanaan.
7. Data merupakan satu-satunya alat ukur dalam keberhasilan sektor pembangunan.
8. Terdapat beberapa hal di Kota Singkawang yang harus dibenahi:
 - a. Pembangunan infrastruktur dan pengendalian masalah banjir ketika curah hujan yang tinggi. Hal ini disebabkan drainase yang perlu ditata kembali. Ketinggian drainase sekunder, tersier dan primer harus dijaga dan diperhatikan khususnya bagi perangkat daerah pengampu kewenangan. Kota Singkawang perlu melakukan pemetaan topografi sehingga dapat diketahui tata letak saluran primer, sekunder dan tersier dalam kaitannya dengan pembangunan drainase. Selain itu, pembangunan drainase perlu memperhatikan luasan resapan air dan curah hujan tertinggi pada kawasan dan luas lahan.
 - b. Kebersihan kota, sehingga perlu adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Kota Singkawang yang bersih.
 - c. Penyediaan air bersih. Jangkauan air bersih Kota Singkawang belum mencapai 60%. Kerjasama antar kabupaten/kota dalam penyediaan air bersih disarankan lebih baik. Misalnya kerjasama antara Singkawang dan Bengkayang dengan menggunakan metode grafitasi dalam penyaluran air baku dari Bengkayang ke Singkawang. Perlu diperhatikan pula pH air karena struktur tanah gambut di Kota Singkawang. Kualitas air tidak hanya sekedar bersih, namun menjadi salah satu kriteria dalam investasi.
 - d. Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Singkawang. Diharapkan ke depan dengan adanya kelurahan/desa mandiri, hal ini dapat dicegah. Desa mandiri artinya memiliki kekuatan sosial, lingkungan dan ekonomi sebagai parameter penguatannya.
9. Dalam suatu kota, sangat penting memiliki peta topografi. Hal ini misalnya memudahkan tugas Badan Restorasi Gambut dalam membuat menentukan sumber titik air dalam tanah sebagai salah satu sumber air baku.

10. Adanya tumpang tindih kepemilikan lahan milik Kota Singkawang dengan daerah latihan TNI perlu segera dikoordinasikan.
11. Keberadaan bandara di suatu kota dapat menarik investor. Kota Singkawang sebagai salah satu kota pusat jasa dan perdagangan harus memetakan dengan benar kebutuhannya. Regulasi mengenai tata ruang hendaknya tidak terlalu rigid, namun tidak juga terlalu longgar. Hal ini harus dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah dan kriteria pembangunan harus memenuhi syarat minimal luasan RTH-nya.
12. Singkawang harus menargetkan kawasan RTH lebih dari 35%, sehingga di masa mendatang jika kebutuhan investasi bidang jasa meningkat, maka luasan RTH masih dapat terpenuhi.
13. IPM Kalimantan Barat adalah terendah se-Kalimantan, salah satunya disebabkan karena data yang sangat minimal, sehingga mungkin saja IPM Kota Singkawang tidak serendah itu.
14. Perlu diperbaiki data di sektor perekonomian. Oleh karena itu, Kalimantan Barat yang semula nilai PDRB-nya berada di urutan ke-4 se- Kalimantan, sekarang berhasil menduduki urutan kedua.
15. Dalam penyusunan dokumen rencana anggaran, perangkat daerah perlu mempertimbangkan rasionalisasi besaran belanja. Misalnya output sebuah kegiatan adalah laporan, sehingga besaran belanja operasionalnya harus sejalan dengan output kegiatannya.
16. Di jajaran pemerintah Kota Singkawang tidak boleh lagi ada penilaian SAKIP yang bernilai B, melainkan minimal BB.
17. Di Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan harus ditempatkan orang-orang yang benar-benar berkualitas.
18. Inspektorat harus berani dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
19. Penempatan SDM dalam suatu posisi harus memperhatikan kompetensi dan kualifikasi pendidikan.
20. Dianjurkan untuk meliburkan sekolah sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini.
21. Berdasarkan hasil survei KOMPAS, Kalimantan Barat merupakan daerah yang paling taat menggunakan masker. Untuk kriteria jaga jarak, Kalimantan Barat berada di urutan ke-3 se-Kalimantan.
22. Diharapkan pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat dilakukan tanpa memandang kalah dan menang dalam politik, namun berdasarkan kebutuhan.

Paparan Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat:

1. Indikator IPM Kota Singkawang meningkat secara umum, kecuali indikator pengeluaran per-kapita.
2. Perlu ditingkatkan pengelolaan air bersih dan tingkat kejadian *stunting* di Kota Singkawang.
3. Diharapkan Kota Singkawang dapat mengambil peran terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan menjadi kegiatan berskala nasional (prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat):
 - a. Pembangunan pelabuhan internasional di Kijing. Fokus penyediaan akses jalan nasional yang mengakses kawasan industri ke Pelabuhan Kijing. Selain itu, perlu memperkuat sektor ekonomi di sekitar kawasan pelabuhan tersebut.

- b. Penyiapan air bersih dan sanitasi kawasan pelabuhan Kijing dan kawasan sekitarnya, kawasan industri Ketapang dan kawasan sekitarnya, kawasan industri Mandor dan sekitarnya.
 - c. Pembangunan kawasan wisata Temajok Paloh.
 - d. Percepatan pembangunan kawasan peruntukan industri di daerah perbatasan.
 - e. Pembangunan politeknik di kabupaten perbatasan dan kawasan industri.
 - f. Pembangunan jembatan Kapuas 3
 - g. Pengendalian banjir (pembangunan drainase utama di Kota Pontianak)
4. Sehubungan dengan program prioritas di atas, Kota Singkawang diharapkan mampu mendorong kerjasama secara bergotongroyong untuk mewujudkan janji-janji politik Wali Kota di akhir periode kepemimpinannya.
 5. Perlu adanya data yang baik dalam mendukung perencanaan pembangunan.
 6. Kota Singkawang sebagai kota jasa, harus melakukan pengendalian banjir melalui penataan drainase.
 7. Kota Singkawang harus bisa mempersiapkan data yang akan dihitung menjadi indikator-indikator capaian, misalnya persentase jalan dengan kondisi mantap. Data tersebut tidak hanya disediakan setahun, tetapi per-tiga bulan sehingga manajemen pengambilan keputusan di tahun tersebut tidak harus menunggu agenda perubahan anggaran.
 8. Diupayakan membangun hubungan komunikasi yang baik dari provinsi ke kabupaten. Selanjutnya diteruskan ke tingkat perangkat daerah yang berhubungan erat dengan kecamatannya, dan kecamatan membuka jaringan dengan Kelurahan/RT/RW sehingga data ter-*update* setiap saat.
 9. Data yang dimiliki oleh Kota Singkawang harus dapat diakses oleh seluruh komponen di Kota Singkawang itu sendiri dan pemerintah provinsi, sehingga data haruslah bersifat terbuka.
 10. Dengan adanya data yang bersifat terbuka, dapat diketahui potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kapasitas Kota Singkawang dalam membangun.
 11. Menjalankan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
 12. Infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial, ekonomi dan politik harus didukung dengan SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dikenal dengan reformasi birokrasi.

Paparan Kepala BAPPEDA Kota Singkawang:

1. Proses musrenbang dilakukan melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam menjaring aspirasi masyarakat dan perwakilan rakyat, sehingga diharapkan proses perencanaan pembangunan dapat maksimal.
2. Diharapkan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dalam penataan Danau Serantangan.
3. Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran, namun disatu sisi meningkatkan pula jumlah UMKM. Perlu dicari jalan keluar dan bantuan dari pemerintah provinsi dalam penanganan dampak COVID-19, salah satunya melakukan ekspor produk industri UMKM.
4. Perlunya dilakukan penataan jalan provinsi dan jalan kota.

5. Jalan Aliyang adalah jalan negara sehingga adanya alih status jalan perlu dilakukan untuk meringankan beban APBD dalam pemeliharaan jalan.
6. Dibangunnya pelabuhan di Kijing memungkinkan terjadinya kemacetan menuju Singkawang. sehingga perlu dipertimbangkan pembangunan jalan lingkar. Selain itu perlu diperhatikan pula jalan menuju SPN di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan.
7. Perlu adanya perhatian dari pemerintah provinsi terhadap status jalan akses antar kabupaten.
8. Bandara mendapat bantuan sebesar Rp100 milyar, dan saat ini dalam proses pelaksanaan tender untuk pengerjaan landasan.
9. Pada TA 2020, terdapat beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang.
10. Beberapa prioritas yang akan dilakukan:
 - a. meningkatkan kualitas pendidikan yang merata; dan
 - b. peningkatan derajat Kesehatan.
11. BAPPEDA terus berusaha mensinkronkan program/kegiatan dengan prioritas pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Revisi RTRW sedang diproses di KLHK untuk mendapatkan legalitas sehingga beberapa kawasan untuk pengembangan Kota Singkawang sebagai kota jasa dapat tertata dengan baik.

Pembahasan :

No.	Nama/Jabatan/ Instansi	Saran/Pertanyaan	Tanggapan
1.	Forum Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa keluhan kesah pembelajaran dengan metode daring: Kesulitan menyerap pelajaran sebagai akibat metode pembelajaran yang diberikan guru. Hasil survei menunjukkan sebanyak 73% siswa memilih melaksanakan pembelajaran secara <i>offline</i>. 2. Banyaknya siswa sekolah yang merokok, sehingga perlu penerapan sanksi di lingkungan sekolah. 3. Berkomitmen untuk tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan yang disponsori oleh produk rokok. 4. Pemerintah perlu menerapkan pemberian <i>reward</i> kepada sekolah yang menerapkan sanksi bebas rokok dan memberikan sanksi kepada sekolah yang membebaskan siswanya merokok di lingkungan sekolah. 	<p><u>Kepala BAPPEDA Kota Singkawang:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program untuk meningkatkan SDM di sektor pendidikan. 2. Sudah ada Perwako dilarang merokok di lingkungan kerja.

No.	Nama/Jabatan/ Instansi	Saran/Pertanyaan	Tanggapan
2.	Majelis Ulama Indonesia	Mengapresiasi Kota Singkawang sebagai kota tertoleran urutan ke-2 setelah Kota Salatiga, dimana selama dua tahun berturut-turut sebelumnya menempati urutan pertama. Setelah dipelajari, instrumen penilaian yang ditekankan antara lain adalah peran pemerintah dalam mendukung terjadinya kerukunan tersebut yang diwujudkan dalam program kerja perangkat daerah dan penganggaran. Diharapkan perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ormas keagamaan.	<u>Kepala BAPPEDA Kota Singkawang:</u> Pemerintah Kota Singkawang terus bekerjasama dengan ormas untuk mensinkronkan program pemerintah dan organisasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan,
3.	STIE Singkawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingatkan kembali bahwa Kota Singkawang adalah kota perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, Kota Singkawang berpotensi menjadi kota penyangga bagi kabupaten lainnya. Kota Singkawang mempunyai peluang untuk mengambil manfaat dari dibangunnya Pelabuhan Kijing. Harus ada terobosan yang dilakukan, sehingga perlu adanya peningkatan akses infrastruktur, pendidikan dan akomodasi. 2. Pemanfaatan pohon gaharu sebagai peluang peningkatan perekonomian di Kota Singkawang. 3. Kota Singkawang sebagai destinasi wisata utama di Kalimantan Barat namun rata-rata lama menginap hanya sekitar 1,14. Perlu dipikirkan bagaimana cara meningkatkan potensi pariwisata, sehingga dapat meningkatkan sektor lainnya seperti sektor ekonomi, UMKM, dll. 4. Pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang sebesar -2,43 masih bisa ditingkatkan. Program pemerintah perlu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat sehingga meningkatkan indeks pertumbuhan ekonomi. 5. Belum tampak adanya upaya pemerintah Kota Singkawang dalam memanfaatkan peluang dibangunnya Palapa Ring di Kota Singkawang. 	<u>Kepala BAPPEDA Kota Singkawang:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju, bahwa Kota Singkawang dapat berperan sebagai kota penyangga. 2. Tingkat provinsi sudah meresmikan SMK Perhotelan, sehingga dapat menciptakan tenaga terampil dalam mendukung kepariwisataan di Kota Singkawang. 3. Sudah bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang.
4.	Masyarakat Adat Dayak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan rakyat menyampaikan 854 usulan. 2. Infrastruktur merupakan isu penting dalam pembangunan. Antara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Singkawang tetap bekerjasama dengan baik, begitu pula antara perangkat daerahnya. Diharapkan program yang sudah direncanakan direalisasikan untuk kepentingan masyarakat banyak. 3. Jalan provinsi menuju Monterado-Bengkayang perlu diperhatikan sebagai akses ke bandara. 4. Penguatan infrastruktur jalan yang menjadi lintas kabupaten. 5. Diharapkan pembangunan dilaksanakan secara merata. 	

No.	Nama/Jabatan/ Instansi	Saran/Pertanyaan	Tanggapan
5.	Dido Sanjaya / DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah 854 usulan dalam musrebang sudah termasuk dengan usulan dari perangkat daerah yang tertuang di dalam Renja? 2. Masih terdapat banyak program yang belum masuk ke dalam daftar usulan Musrenbang Tingkat Kota, terutama dari Kelurahan Melayu dan Kuala. Misalnya di Kelurahan Kuala, terdapat usulan penyediaan penerangan jalan dan peningkatan fasilitas pendukung wisata mangrove untuk peningkatan iklim ekonomi kreatif di Kelurahan Kuala. 3. Berdsarkan arahan Gubernur, disampaikan indikator peningkatan usia harapan hidup di Kalimantan Barat yang masih rendah, dengan salah satu indikatornya adalah ketersediaan air bersih. Pemerintah Kota Singkawang dinilai belum memberikan konsentrasi penuh dalam penyediaan air bersih. Oleh karena itu, dimohon dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam penyediaan air baku, seperti pembangunan <i>intake</i>. 4. Terjadi kekeringan di Kelurahan Kuala karena tidak cukupnya sumber air baku. 	<p><u>Wali Kota Singkawang:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa usulan yang masuk sudah disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah, sehingga ada beberapa usulan yang dapat diakomodir maupun ditolak. 2. Sampai saat ini anggaran APBD belum mencapai 1T rupiah, sehingga pelayanan yang dilakukan secara bertahap. Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui pendanaan APBD, akan diupayakan melalui pendanaan APBN atau DAK.
6.	Tasman, S.Pd./ DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyarankan agar penegakan tata tertib di sekolah dilakukan, antara lain dengan melarang siswa merokok di lingkungan sekolah. 2. Terjadi lonjakan harga penginapan pada penyelenggaraan <i>event-event</i> tertentu sehingga tingkat hunian penginapan menjadi rendah. 3. Dari 854 usulan yang masuk hendaknya pertimbangan disetujui atau tidaknya usulan tersebut merujuk kepada skala prioritas pembangunan Kota Singkawang. Mohon dikordinasikan dengan DPRD saat pelaksanaan eksekusi usulan tersebut. 	
7.	Anggota DPRD	Di RT 6 Jalan Wonosari, lokasi Danau Biru yang berubah menjadi genangan lumpur. Perlu diperhatikan kelangsungannya sebagai potensi destinasi wisata di Kota Singkawang.	
8.	Direktur PDAM Kota Singkawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas <i>intake</i> PDAM Kota Singkawang saat ini baru mencapai 330 L/detik dengan kebocoran sebesar $\pm 30\%$. 2. Sumber <i>intake</i> yang dimanfaatkan saat ini berasal dari <i>intake</i> Sungai Semelagi sebesar 150 L/detik yang diolah di Kelurahan Roban, untuk didistribusikan ke se-Kota Singkawang dengan wilayah distribusinya adalah Singkawang Barat, Singkawang Tengah dan sebagian kecil wilayah Singkawang Selatan. 3. <i>Intake</i> Sejangkung saat ini mengalami kekeringan. Sebagai <i>backup</i>, potensi lainnya berada di Danau Serantangan untuk membantu penyediaan air baku ke wilayah Singkawang Selatan. 4. Wilayah Singkawang Timur mendapatkan air baku dari <i>intake</i> Sungai Seluang. 	

		<p>5. Diharapkan dapat dibangun IPA sebanyak satu unit di Sungai Seluang dengan kapasitas 220L/detik untuk mendistribusikan air baku ke wilayah Kecamatan Singkawang Timur.</p> <p>6. PDAM Kota Singkawang sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Kalimantan Barat untuk peningkatan penyediaan air bersih.</p>	
--	--	---	--

Kesimpulan:

Wali Kota Singkawang menegaskan:

1. Visi dan misi Wali Kota Singkawang yang berfokus pada peningkatan infrastruktur.
2. Penyediaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah Pusat dan Kota Singkawang mendapatkan pinjaman sebesar ±Rp 200 milyar yang dapat dialokasikan untuk percepatn pembangunan.
3. Penerapan prinsip gotong royong antara DPRD Provinsi dan DPRD Kota dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang.
4. Sudah direncanakan beberapa langkah strategis dalam peningkatan iklim ekonomi di Keluarahan Kuala.
5. Peyediaan bantuan air bersih perlu didukung dengan kelengkapan administrasi, antara lain Perda terkait hal dimaksud sehingga penyertaan modal dalam pendistribusian air bersih baru bisa dilakukan.
6. Adanya rencana pemindahan lokasi TPA diharapkan dapat mengoptimalisasi pengembangan Danau Biru.

Notulis,
Kasubbid Inovasi dan Teknologi

Pimpinan,
Kepala Badan

SURYA NENGSIH, S.Si., M.Sc.
NIP. 19841113 200803 2 003

Ir. YUSNITA FITRIADI
NIP. 19630525 199303 1 005